

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK TAMB	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA MEDIA INDONESIA	HALAMAN 3	TANGGAL 20-08-2002
------------------	---	--------------	-----------------------

Ketua TP4L Diminta Bertindak Tegas

JAKARTA (Media): DPR memberi peringatan terakhir kepada Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Penguasaan Pasir Laut (TP4L) Rokhmin Dahuri agar menindak tegas semua pihak yang terlibat penyelundupan pasir laut.

Jika dalam minggu ini belum ada ketegasan sikap dan tindakan hukum terhadap tujuh kapal pasir laut yang ditangkap TNI-AL, Komisi VIII DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) pasir laut.

"Kami punya bukti kuat untuk memanggil Ketua TP4L dan membentuk pansus pasir laut," tegas anggota Komisi VIII Priyo Budisantoso di Jakarta, kemarin.

Priyo kecewa atas lambannya pemeriksaan terhadap tujuh kapal pasir laut yang tertangkap basah akan menyelundupkan komoditas hasil tambang itu ke Singapura. Padahal, TP4L tidak lagi punya alasan untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan mengingat para pelaku sudah terbukti melakukan penyelundupan.

Namun, Rokhmin Dahuri yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan kelambanan penanganan terhadap tujuh kapal itu dikarenakan beberapa pemilik kapal tidak kooperatif. Tapi, dia berjanji akan memberikan sanksi pada Jumat (23/8) yang merupakan hasil keputusan rapat Kamis (22/8) para menteri terkait.

"Kini saya sudah menggenjotnya untuk ditindak tegas," kata Rokhmin kepada *Media* sesuai sidang kabinet di Gedung Utama Setneg, kemarin.

Rokhmin juga membantah jika dikatakan keterlambatan itu disebabkan dirinya takut menjerat para pemilik kapal. Sebab, menurut Rokhmin, hal itu juga disebabkan pencurian pasir laut merupakan kasus pertama sepanjang sejarah pasir laut di Indonesia. Apalagi, perangkat hukum untuk menjerat para pelaku sangat ringan sekali.

"Jadi, kami sedang mencari celah untuk menjeratnya karena sebenarnya yang mereka lakukan berat hukumannya, yaitu manipulasi ekspor dan melanggar daerah pertambangan," tegas Rokhmin.

Terjebak permainan

Dalam pandangan Priyo, alasan Ketua TP4L yang menyatakan lambannya pemeriksaan karena para pelaku tidak kooperatif jelas membuktikan dugaan adanya

kekuatan atau kekuasaan di balik tujuh kapal tersebut.

"Alasan itu tidak dapat diterima. Saya semakin curiga ada kekuatan di belakang kasus ini yang mampu membungkam TP4L. Kasus ini harus dibongkar melalui pansus," tandasnya.

Dia justru menilai Ketua TP4L tidak serius menanggapi kasus penyelundupan pasir laut. Ini terbukti dengan diulur-ulurnya waktu pemeriksaan terhadap mereka yang terbukti menyelundupkan pasir laut.

Dikemukakannya pula soal kecurigaannya terhadap penangkapan ketujuh kapal pasir laut yang mengandalkan TNI-AL Armada Timur, padahal lokasi penambangan pasir laut berada di wilayah Armada Barat. Priyo mengharapkan aparat keamanan tidak terjebak dalam permainan para pengusaha yang kerap memanfaatkan keberadaan aparat keamanan untuk menakut-nakuti instansi pemerintah lainnya.

"Kalau benar bahwa yang melakukan penangkapan itu Armada Timur TNI-AL, lantas ke mana Armada Barat yang seharusnya bertanggung jawab di wilayahnya?" kata Priyo.

Anggota Komisi VIII ini kembali memperingatkan Ketua TP4L agar tidak bermain mata dengan mengulur waktu kasus tersebut. Sebab, kasus pasir laut ini telah menjadi barometer penegakan hukum di Indonesia. Apalagi, Singapura juga terbukti memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Ini masalah harga diri bangsa. Jangan sampai seorang Rokhmin mau disogok atau diprovokasi untuk mengorbankan kepentingan bangsa. Ini peringatan terakhir atau DPR akan membentuk pansus."

Seperti diketahui, sampai kini ketujuh kapal keruk pasir laut yang terbukti tidak dilengkapi dokumen sah masih ditahan aparat keamanan. Ketujuh kapal itu MV Professor Gurjonov (Rusia), MV Samsung Apollo (Korea), dan MV Vasco Da Gama (Belanda), yang ditangkap di Selat Durian. (Uut/Tia/Nic/E-2)